

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-4 Bulan Juli 2021 (tanggal 23 s.d. 29 Juli)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Izzaty
Peneliti Muda/Kebijakan Ekonomi
izzaty@dpr.go.id

PPKM DAN PENGANGGURAN

ISU ATAU PERMASALAHAN

Penyebaran Covid-19 secara masif terjadi di Indonesia. Pemerintah merespon dengan aturan Retriksi PPKM Darurat yang sebenarnya lebih longgar dari penerapan PSBB tahun lalu. Namun cakupan wilayahnya lebih masif dari tahun lalu.

Dampak Kebijakan PPKM Darurat dan PPKM Level- 4 tentu berimbas pada pengusaha dan UMKM, dan selanjutnya berimbas kepada terjadinya PHK secara massal. Prediksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 akan berada di kisaran 7,15-7,35% atau 9,9 juta sampai 10,27 juta orang. Angka lebih tinggi daripada TPT Agustus 2020, yaitu 7,07%.

Gangguan pada *supply* dan *demand shock* terjadi akibat pandemi dan kebijakan PPKM yang menyertainya. Konsumen menahan konsumsinya dan akibatnya terjadi gangguan pada *supply chain*, situasi yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya proses produksi. Di sisi lain, penyebaran Covid-19 membuat masyarakat mengurangi aktivitas yang membutuhkan interaksi fisik sehingga mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa (*demand shock*). Implikasinya, penurunan permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan berimplikasi pada penurunan pendapatan orang-orang yang bekerja di sektor yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, penurunan pendapatan pekerja akan berdampak terhadap penurunan permintaan. Jika dibiarkan, akan terjadi kontraksi perekonomian.

Jika PPKM Level 4 terus diperpanjang tanpa kepastian dan diperparah dengan meningkatnya jumlah buruh penderita Covid-19 dan buruh isoman tidak diberi obat dan vitamin gratis, serta lambatnya vaksinasi gratis bagi buruh, maka bisa dipastikan ledakan PHK akan terjadi di tengah PPKM Level ini.

Pemerintah memang telah menyiapkan program untuk perlindungan sosial dan insentif bagi dunia usaha untuk tetap berjalan dan tidak melakukan PHK. Pemerintah juga telah memberikan insentif melalui Kartu PraKerja yang pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Dengan tambahan anggaran Rp10 triliun pada tahun 2021, jumlah peserta kartu prakerja dapat ditambah sebanyak 2,8 juta orang.

SUMBER

Bisnis Indonesia, 29 Juli 2021; Kompas, 29 Juli 2021.